

Implementasi Program Layanan Internet Anak-Anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) Di Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Madiun

Septia Marda Syahputri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Septiamarda90@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Salah satu alternatif mengurangi rendahnya pengetahuan anak-anak desa tepian hutan tentang informasi dan teknologi, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun mengeluarkan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan). Program Literasi Hutan adalah program yang mengarah kepada peningkatan pengetahuan anak sekolah dasar akan teknologi informasi. Kelompok sasaran dalam program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan ini adalah siswa Sekolah Dasar yang ada di sekitar hutan. Kegiatan program Literasi Hutan seperti pengenalan IT, pengenalan komputer/notebook (Hardware), pengenalan internet, praktek internet, dan membuat kesimpulan terhadap pentingnya pemanfaatan internet yang sehat. Pada pelaksanaannya, anak-anak dan masyarakat belum paham tentang adanya program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) dan belum mencakup seluruh kelompok sasaran. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan adalah variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil peneliti menunjukkan ukuran dan tujuan kebijakan masih dalam tahap pengenalan internet saja, Sumber daya masih kurang dari segi sumber dayanya manusianya, anggaran, serta sumber daya waktu, karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi, sikap para pelaksana kebijakan sudah baik, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan masih kurang, rendahnya dukungan lingkungan ekonomi dan sosial. Saran peneliti yaitu ukuran dan tujuan kebijakan sebaiknya lebih pada pemanfaatan layanan internet, menambah jumlah sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas layanan, meningkatkan komunikasi antar organisasi dengan pihak-pihak terkait, meningkatkan aktivitas pelayanan pada upaya pelaksanaan internet, bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir masalah ekonomi dan sosial.

Kata kunci : Implementasi, Literasi, Sekolah Dasar

Abstract

An alternative to reducing the knowledge of rural forest village children on information and technology, the Library and Archives Office of Madiun District issues the Children's Service Program of Forest Edition Villages (Forest Literacy). The Forest Literacy Program is a program aimed at improving the knowledge of primary school children about information technology. The target group in the Forest House Children's Internet Service program is elementary school students around the forest. Forest Literacy program activities such as the introduction of IT, the introduction of computers / notebooks (Hardware), the introduction of the internet, the practice of internet, and make conclusions on the importance of healthy internet utilization. In practice, the children and the community have not understood the existence of the Forest House Forest Children's Internet Service (Literacy of Forests) program and have not covered all the target groups. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The research focus used are the variables of measure and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, Disposition of implementers, inter-organizational communication and implementing activities, and economic, social and political environment. Data collection techniques used were interviews, observation, documentation, and literature study. The researchers' work shows the size and purpose of the policy is still in the introduction phase internet course, resources are still lacking in terms of human resources, budget, and resources of time, the characteristics of the executing agency has met, the attitude of the executor of the policy is good, communication between the organization and activity implementation still less, low support economic and social lingkungan. The

researchers suggest that the size and purpose of policy should be on the utilization of internet services, increasing the number of human resources, budget, and facilities services, improve communication among organizations with related parties, enhance the activity pelyanan on implementing the internet, together with related parties to minimize the economic and social problems.

Keywords: Implementation, Literacy, Elementary School

PENDAHULUAN

Sejak munculnya teori generasi (*Generation Theory*) terdapat 5 (lima) generasi yang lahir setelah perang dunia kedua dan berhubungan dengan masa kini menurut teori generasi, yaitu Baby Boomer (lahir tahun 1946-1964), Generasi X (lahir tahun 1965-1980), Generasi Y (lahir tahun 1981-1994), Generas Z (lahir tahun 1995-2010), dan Generasi Alpha (lahir tahun 2011-2025). Dalam teori generasi tersebut, generasi Z yaitu generasi yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada era revolusi informasi dengan era digital dan aneka teknologi yang komplit dan canggih dimana terjadi arus informasi secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga terbentuk suatu lingkungan secara universal atau global dengan jangkauan yang luas dimana informasi dapat diperoleh oleh setiap orang dengan mudah. Bagi anak generasi Z mereka sudah mengenal sebuah teknologi sejak kecil dimana mereka mengenal berbagai *gadget* yang canggih, baik secara langsung maupun tidak langsung sebuah teknologi dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan kepribadian anak.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang. Diharapkan semua anak yang lahir di generasi Z benar-benar tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Dimana mereka dapat mengenal dan menggunakan teknologi (melek teknologi) dan tidak menghendaki generasi yang gaptek (gagap tekonologi) serta teknologi tidak dipegang oleh orang-orang yang salah. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan fasilitas kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya dan dapat memanfaatkan adanya teknologi secara tepat dan benar sesuai kebutuhan.

Teknologi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi anak-anak yang hidup di perkotaan. Mereka dapat dengan mudah mengakses dan mengeskpresikan apapun yang mereka inginkan. Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah tersedia, lain halnya dengan mereka yang hidup jauh dari perkotaan yang minim akan fasilitas-fasilitas seperti di kota, seperti mereka yang hidup di pedesaan khususnya mereka yang ada di desa sekitar hutan. Anak-anak yang hidup di desa sekitar hutan tidak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Mereka yang hidup di desa tepian hutan belum mengenal apa itu teknologi seperti internet, gadget dan lain sebagainya. Padahal mereka juga mempunyai hak yang sama untuk meneruskan hidupnya. Sehingga perlu

adanya kesama rataan hak agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara anak perkotaan dengan anak desa tepian hutan.

Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun membentuk sebuah program yaitu program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) untuk menjamin kebutuhan informasi bagi generasi Z yang hidup di desa sekitar hutan. Program ini diberi nama Literasi Hutan. Program ini bertujuan pengenalan dini terhadap pemanfaatan teknologi internet untuk membantu kelancaran kegiatan belajar serta membuka cakrawala wawasan siswa.

Program ini merupakan wujud nyata terhadap implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana pada pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat fakta geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus, yang diturunkan dalam Perbup No. 33 Tahun 2014 pasal 19 tentang Perpustakaan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun yang berisi:

- 1) Dalam rangka pembudayaan gemar membaca diselenggarakan pelayanan mobil perpustakaan keliling
- 2) Sasaran pelayanan mobil perpustakaan keliling selain di sekolah dapat juga di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat
- 3) Pelayanan mobil perpustakaan keliling di sekolah dasar yang berlokasi di desa tepian hutan dilengkapi dengan layanan internet.

Program layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan terintegrasi dengan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling dimana mekanisme pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terdapat sebanyak 3 unit mobil yaitu dengan peralatan berupa 3 unit laptop dan perangkat modem dengan kartu perdana sesuai sinyal setiap desa. Layanan mobil perpustakaan keliling merupakan salah satu implementasi tugas pokok dan fungsi dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. (www.jipp.jatimprov.go.id)

Dalam implementasi Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) yang mengacu pada Standar Operasional Produsen (SOP) dilaksanakan sejak 3 Februari 2014 sampai sekarang. Dalam pelaksanaan program Literasi Hutan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, yang dibawah oleh Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yang berkoordinasi

dengan kasubbag TU, kasi layanan dan informasi, staf layanan dan informasi tenaga kontrak layanan dan informasi kantor. Dalam pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan para pelaksana kegiatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Penentuan kelompok sasaran mengacu pada jumlah Sekolah Dasar yang berada di wilayah sasaran, metode pembelajaran dalam bentuk silabus sederhana tentang Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan sebagai acuan pelaksanaan program, penyusunan jadwal layanan kunjungan sesuai dengan silabus program Literasi Hutan, di akhir layanan dilakukan evaluasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta tanggapan dari peserta. Kegiatan-kegiatan Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan meliputi pengenalan informasi teknologi, pengenalan komputer/notebook (*hardware*), pengenalan internet, praktek internet dan membuat kesimpulan sederhana tentang pentingnya pemanfaatan internet yang sehat. (www.jipp.jatimprov.go.id)

Kabupaten Madiun memiliki luas wilayah 1.010, 86 km, terdiri dari 15 kecamatan, yang meliputi 198 desa dan 8 kelurahan. Diantara 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun terdapat 7 Kecamatan atau 40% wilayahnya masuk dalam kategori desa tepian hutan yaitu Kecamatan Pilang kencana, Saradan, Gemarang, Kare, Dolopo, Dagangan dan Wungu. Sebelum inisiatif ini muncul terdapat 15.801 anak Sekolah Dasar yang ada di 7 kecamatan tersebut belum akrab dengan informasi teknologi. Secara geografis desa ini bertopografi berbukit, jauh dari perkotaan, infrastruktur desa yang kurang memadai, fasilitas komunikasi yang tergolong tertinggal, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan serta rendahnya tingkat pendapatan keluarga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan perangkat teknologi seperti komputer dan laptop. Disisi lain koneksi jaringan internet juga belum memadai, sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan anak-anak tepian hutan tentang teknologi informasi. Ini berarti anak-anak generasi Z yang tinggal di desa tepian hutan tersebut relatif tertinggal dibandingkan dengan anak-anak generasi Z yang hidup di wilayah perkotaan. (www.perpustakaan.madiunkab.go.id).

Dari kebijakan yang telah dibuat guna mencapai tujuan dan sasaran dari program diperlukan proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan diperlukan guna mengetahui apakah kebijakan yang telah dibuat sudah sesuai untuk menangani masalah yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dengan melakukan implementasi kebijakan maka suatu kebijakan dapat dinilai dan dievaluasi oleh pelaksana kebijakan

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang

telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Dalam implementasi mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun bagi anak-anak yang tinggal di tepian hutan akses teknologi dan informasi belum familiar bagi mereka, keterbatasan sarana prasarana dan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan serta rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan perangkat teknologi seperti komputer dan laptop. Disisi lain koneksi jaringan internet juga belum memadai, sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan anak-anak tepian hutan tentang teknologi informasi.

Dari fenomena di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai inovasi pemerintah Kabupaten Madiun tentang program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan ini menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Alasan peneliti menggunakan model ini adalah karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program yang diberikan oleh pelaksana kelompok sasaran.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, fokus penelitian menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Miles Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2014:246) yaitu *Data Collection, Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing and Verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam variabel ini ukuran dan tujuan dari kebijakan harus jelas agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai. Apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan tidak jelas maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah terjadi konflik diantara para agen pelaksana, sehingga dalam pelaksanaan program Literasi Hutan dibutuhkan kejelasan ukuran dan tujuan agar

pelaksanaan program Literasi Hutan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) memiliki tujuan untuk pengenalan dini terhadap pemanfaatan teknologi internet untuk membantu kelancaran kegiatan belajar serta membuka cakrawala wawasan siswa. Program ini merupakan wujud nyata terhadap implementasi Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana pada pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat fakta geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Secara umum pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perpustakaan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun yang berisi:

1. Dalam rangka pembudayaan gemar membaca diselenggarakan pelayanan mobil perpustakaan keliling
2. Sasaran pelayanan mobil perpustakaan keliling selain di sekolah dapat juga di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat
3. Pelayanan mobil perpustakaan keliling di sekolah dasar yang berlokasi di desa tepian hutan dilengkapi dengan layanan internet.

Pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan sudah terlaksana secara menyeluruh, tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya siswa sekolah dasar yang belum mengerti adanya program dan cara pengoperasian komputer dan internet dengan baik dan benar serta kegiatan layanan masih dalam tahap pengenalan internet saja.

2. Sumber Daya

Di dalam suatu implementasi kebijakan tentunya diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu tentunya sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena sumber daya manusia merupakan penggerak dari sebuah kebijakan yang ada. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia.

Kebijakan akan berhasil jika kebijakan tersebut telah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten pada bidangnya dan mencukupi, begitupun sebaliknya pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan jika sumber daya manusia yang ada tidak kompeten pada bidangnya dan jumlah sumberdaya manusia yang ada tidak memadai.

Sumber daya manusia yang menjalankan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) adalah Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan program Literasi Hutan memiliki 3 staff yang paham IT. Terkait sumber daya manusia yang melaksanakan program Layanan Internet Anak-Anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) staf atau petugas sudah profesional dan kompeten dalam bidangnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sumber daya manusia yang ada sudah memadai akan tetapi berdasar hasil observasi perlu adanya penambahan pegawai karena dilihat dari rasio murid tidak sesuai dengan petugas yang memberi layanan guna menunjang keberhasilan program.

b) Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan menyangkut pengalokasian dana dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Pada pelaksanaan sebuah kebijakan sumber daya keuangan sangat penting, walaupun sebuah kebijakan sudah didukung dengan sumber daya manusia yang baik tapi dana yang ada tidak mencukupi maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan maksimal.

Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan kegiatan program Layanan Internet Anak-Anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) mendapat dukungan anggaran dari APBD tahun 2014 sebesar Rp. 115.920.000,- dan APBD tahun 2015 melalui alokasi anggaran kegiatan masyarakat minat dan budaya baca sebesar Rp. 120.750.000,- dan pada tahun 2016 anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- (sudah termasuk dengan kegiatan perpustakaan keliling reguler). Anggaran tersebut digunakan untuk operasional mobil perpustakaan keliling sebanyak 3 unit, perangkat komputer atau laptop sebanyak 3 unit, dan perangkat modem lengkap dengan beberapa jenis *sim card* (kartu perdana). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang penuli lakukan menurut Bapak Eko selaku Kepala kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun menyatakan sumber daya dana dari program Literasi Hutan sudah cukup, akan tetapi berdasarkan pengamatan yang dilakukan sumber daya anggaran masih kurang dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan masih terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kelompok sasaran .

c) Sumber daya waktu

Sumber daya waktu dalam pelaksanaan program Layanan Internet Anak-Anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) ialah ketersediaan waktu dalam pelaksanaan program tersebut. Van Metter dan Van Horn menyatakan bahwa walaupun sumber daya manusia terpenuhi dan giat bekerja, serta sumber daya keuangan berjalan dengan baik tetapi apabila terbentur oleh persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun akan menjadi penyebab bagian dari ketidak berhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya waktu dalam pelaksanaan program Layanan Internet Anak-Anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) selama satu jam dirasa masih kurang dan pelaksanaan program dilakukan selama satu tahun sekali bahkan lebih. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis terkait waktu yang diberikan masih kurang karena masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan giliran sedangkan waktu yang diberikan sudah habis dan jangka waktu pelayanan yang diberikan selama program ini berjalan selama satu tahun sekali dirasa sangat kurang karena di dapati siswa yang sudah lupa adanya layanan tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan yang dapat dicapai dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan. Badan pelaksana disini dapat meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Agustino (2008) menyatakan bahwa pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan.

Di dalam implementasi program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) tentunya dibutuhkan karakteristik yang ideal untuk menunjang keberhasilan program. Pada pelaksanaan program layanan internet anak-anak desa tepian hutan (literasi hutan) meliputi Kepala Kantor, Kasubbag TU, Kasi Layanan dan Informasi, Staf Layanan dan Informasi, Tenaga kontrak layanan dan Informasi Kantor. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun sebagai pelaksana utama mempunyai tugas memberikan pelayanan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Terkait individu yang terlibat dalam pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun adalah Kepala Kantor dan staffnya. Jumlah individu yang sedikit menjadikan kemungkinan kesalahan dalam penyampaian informasi sangat minim, sehingga segala proses yang berkaitan dengan Literasi Hutan dapat dikatakan lancar dan telah mencapai hasil yang cukup baik. Namun dalam penyampaian informasi tentang Literasi Hutan kepada masyarakat/siswa masih kurang karena tidak seluruh siswa tahu tentang adanya program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh agen pelaksana, siswa berpendapat bahwa aktor pelaksana telah memiliki

karakter yang diinginkan dan sudah sesuai oleh siswa, yakni karakter agen pelaksana yang paham dengan tugasnya sendiri, ramah dan tanggap terhadap keinginan siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun karakteristik yang harus dimiliki oleh agen pelaksana harus paham dengan program Literasi Hutan yakni mengerti bagaimana kebijakannya, alur serta proses pelayanan program Literasi Hutan, karena jika pelaksanaanya saja sudah tidak paham maka programnya tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan program tidak dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan program para agen pelaksana juga melakukan proses pendekatan pada siswa. Agen pelaksana selaku *public service* harus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa agar mereka merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan.

4. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap para pelaksana ialah terkait sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Variabel ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya respon yang diberikan para pelaksana terhadap kebijakan. Menurut Widodo (2007:105) terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri atas pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, apakah arah respon implementor pada kebijakan yang dilaksanakan menerima atau menolak.

Sikap dari pelaksana program Layanan Internet Anak-Anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) dikatakan cukup baik. Dilihat dari para pegawai yang selalu siaga dalam memberikan pelayanan dengan baik. Selain itu semua pegawai sudah paham tentang tugasnya masing-masing karena pegawai yang ada merupakan orang-orang yang kompeten.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Dalam variabel komunikasi ini yang dimaksud komunikasi ialah cara penyampaian pesan atau informasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan agar setiap pihak yang terlibat dapat mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Semakin baik komunikasi yang telah terjalin antara semua pihak maka akan memperkecil kesalahan yang akan terjadi. Komunikasi juga digunakan untuk penyampaian informasi dari pelaksana kepada kelompok sasaran agar tujuan dari program dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan kebijakan maka diperlukan komunikasi yang baik.

Dalam pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun tentunya sudah ada koordinasi antara level paling atas sampai level paling bawah agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Sosialisasi merupakan suatu alat untuk mempermudah dalam penyampaian informasi, dengan

adanya sosialisasi maka antara pelaksana dengan kelompok sasaran program tidak terjadi miskomunikasi. Di dalam pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) koordinator yang bertanggung jawab adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun karena Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun merupakan instansi yang diberi wewenang dalam memberikan pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya bukan hanya Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun saja yang menjadi pelaksana, pihak sekolah juga merupakan pihak yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kepada siswa-siswi. Pada level sekolah dasar koordinator yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah dan guru-guru sebagai pelaksana.

Miskomunikasi antar pihak yang terlibat dikatakan ada karena program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) ini merupakan program baru dan masih dalam masa transisional. Miskomunikasi yang dimaksudkan adalah seperti kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasi namun masih dalam batas wajar.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, komunikasi yang ada antara Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun dengan pihak-pihak yang terkait masih kurang karena tidak ada komunikasi secara berkelanjutan dan komunikasi dengan masyarakat masih kurang maksimal hal ini karena cara komunikasi yang mereka lakukan melalui internet sedangkan mereka yang ada di sekitar hutan belum familiar dengan adanya internet.

6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga sangat memengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan suatu program. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Jika kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak mendukung maka akan menghambat proses pelaksanaan program Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, jadi dalam program ini dukungan dari faktor eksternal sangat dibutuhkan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

a) Lingkungan ekonomi

Lingkungan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program literasi hutan adalah rata-rata masih rendahnya tingkat ekonomi keluarga sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak akan perangkat teknologi seperti komputer dan laptop yang dapat menghambat pelaksanaan layanan.

b) Lingkungan sosial

Dalam pelaksanaan program layanan internet anak-anak desa tepian hutan (literasi hutan) lingkungan sosial kendala sosial yang dialami ialah

akses internet yang kurang memadai sehingga mempengaruhi kegiatan Literasi Hutan.

c) Lingkungan politik

Lingkungan politik disini ialah pemerintah kabupaten madiun (bupati) mendukung pelaksanaan program layanan internet anak-anak desa tepian hutan (literasi hutan). Dukungan yang ada dalam pelaksanaan program layanan internet anak-anak desa tepian hutan (literasi hutan) bukan hanya dari Bupati Madiun tetapi juga Komisi A DPRD Kabupaten Madiun. Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) bertujuan untuk memberikan pelayanan pemahaman akan teknologi informasi kepada anak-anak sekolah dasar di tepian hutan, sehingga semua pihak baik pemerintah, elit politik, dan pihak yang terkait serta masyarakat/siswa akan sangat mendukung adanya program ini.

Pernyataan-pertanyaan tersebut juga diberikan oleh siswa/siswi sekolah dasar. Mereka sangat mendukung adanya program Literasi Hutan karena program ini membawa dampak yang positif bagi mereka yakni mereka yang belum paham akan teknologi informasi menjadi tahu dan paham.

Saran

Dari hasil pemaparan mengenai implementasi Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Untuk tujuan kebijakan sebaiknya lebih kepada pemanfaatan layanan internet secara jelas.
2. Menambah Sumber Daya Manusia, Anggaran, serta fasilitas layanan supaya dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
3. Meningkatkan komunikasi antar organisasi dan dengan pihak-pihak terkait.
4. Meningkatkan aktivitas pelayanan pada upaya pelaksanaan internet.
5. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir masalah ekonomi dan sosial. Dimana dapat dilakukan dengan berkontribusi dengan pihak-pihak Desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. sebagai dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Farid Maruf, S.Sos., M.AP. dan Ibu Hj. Weni Rosdiana, S.Sos. M.AP. sebagai dosen penguji penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Oemi. 1995. *Dasar-Dasar Publik Relation*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amir, Fikri aniIzki, Hafied Cangara, Muhammad Farid. 2014. Implementasi Program M-PlikKemkominfoTerhadapPengenaln Dan Pemanfaatan Internet BagiMasyarakatKabupatenMaros Dan Jeneponto.Universitas Hasanuddin. Volum 3 Nomor 3.
- Dunn, William. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gagah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan kelima. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Taspcott, Don (2008). *Grown Up Digital:How the Net Generation is Changing Your World*. McGraw-Hill.
- Tertulianus, Oding. 2015. Implementasi Program PerpustakaanKeliling di Kecamatan Sungai Raya KabupatenKubu Raya. Univeritas Tanjungpura Pontianak.Volum 4 Nomor 2.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses KebijakanPublik)*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Presindo.
- Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – Undang N0 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- www.perpustakaan.madiunkab.go.id
- www.jipp.jatimprov.go.id